

## MENDORONG IMPLEMENTASI REDENOMINASI RUPIAH UNTUK PENINGKATAN EFISIENSI DAN DAYA SAING EKONOMI INDONESIA DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

B.Andreas Mada WK

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ABFI Perbanas Jakarta, Jakarta

### ABSTRAK

Kebijakan redenominasi merupakan wacana yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan agar perekonomian dapat menjadi lebih efisien serta untuk meningkatkan martabat dan kedaulatan rupiah di mata dunia Internasional terutama sejak pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 yang lalu. Namun untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah perkara yang mudah, mengingat masih banyaknya pro-kontra di dalamnya. Redenominasi memang memberikan banyak manfaat namun juga dapat menimbulkan dampak negatif yakni inflasi akibat pembulatan harga dan juga “money illusion” dimana harga barang dianggap menjadi lebih murah. Dengan demikian diperlukan adanya persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti mempersiapkan infrastruktur serta sosialisasi yang jelas kepada Masyarakat bahwa redenominasi beda dengan sanering.

Penelitian ini menggunakan Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factors Evaluation (EFE). Dalam matriks IFE akan menganalisis dua variable dari SWOT yaitu, Kekuatan (Strength) apa saja yang dimiliki oleh negara Indonesia dan Kelemahan (Weakness) yang ada dalam internal itu sendiri. Sedangkan matriks External Factor Evaluation (EFE) memungkinkan Pemerintah dan para penyusun strategi untuk merangkum dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan lain-lain agar kebijakan redenominasi dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi terutama sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA.)

**Kata kunci :** *Uang, Rupiah, Redenominasi, MEA, IFE, EFE*

### PENDAHULUAN

Dalam pengantar ilmu ekonomi, harga (*price*) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan dipengaruhi oleh faktor permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Jika harga tersebut dinilai terlalu tinggi oleh pasar maka jumlah permintaan akan berkurang dan sebaliknya jika pasar menilai harga tersebut rendah maka jumlah permintaan akan meningkat. Tingginya harga akan mengurangi kemampuan pembeli untuk membeli barang (*purchasing power*). Hukum permintaan dan penawaran akan kembali berlaku, dan sebagai konsekuensinya harga yang tinggi tersebut akan menurun sampai tercipta posisi keseimbangan yang baru (*equilibrium*). Hal yang sama dengan fungsi uang yaitu segala sesuatu yang siap sedia dan pada umumnya diterima dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa dan untuk membayar utang (Thomas, R. G, 2001).

Selanjutnya dalam perekonomian uang memiliki peranan yang sangat penting. Uang tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa, maupun utang. Uang dapat didefinisikan segala sesuatu yang secara umum mempunyai fungsi : sebagai satuan pengukur nilai, sebagai alat tukar menukar dan sebagai alat penimbun/penyimpan kekayaan. Mata uang harus merupakan sesuatu yang benar dan sehat (*real sound money*). Mata uang yang sehat nilainya stabil apabila harga-harga barang yang dinyatakan dengan kesatuan uang tersebut pada umumnya tetap tidak mengalami perubahan, yang berarti dalam waktu yang agak lama. Disamping itu, uang sehat memperlihatkan perbandingan atau kurs yang tetap terhadap kesatuan-kesatuan uang luar negeri yang penting artinya untuk perdagangan internasional seperti Dollar, Poundsterling, Mark Jerman, dan lain-lain. Sedangkan uang yang tidak sehat adalah uang yang nilainya seringkali turun dan tidak stabil. Di Indonesia, mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Mata uang rupiah yang beredar saat ini terdiri dari berbagai pecahan nominal yang paling kecil yaitu Rp 50 sampai dengan nominal yang paling besar yaitu Rp 100.000. Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dapat dikatakan mengalami perkembangan yang positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya transaksi didalam masyarakat. Namun meningkatnya transaksi tersebut juga menyebabkan angka digit rupiah yang digunakan juga semakin banyak. Hal ini berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dalam transaksi keuangan, karena masyarakat akan direpotkan untuk membawa jumlah uang yang besar ketika melakukan transaksi keuangan dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam sistem pembayaran non tunai pada akhirnya juga akan mengakibatkan permasalahan dalam pencatatan, karena dalam sistem pencatatan terdapat pembatasan angka digit yang dapat ditolerir oleh sistem pembayaran

dan sistem pencatatan. Angka digit yang banyak juga akan memberikan persepsi rendahnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing (Nilasari, 2014).

Wacana Bank Indonesia (BI) terkait dengan redenominasi rupiah mencerminkan juga teori pengantar ekonomi yang disampaikan diatas. Harga mata uang rupiah saat ini dianggap sebagai mata uang yang sangat besar “nilai” nominalnya (nilai yang tertera dalam mata uang). Diibaratkan untuk membeli sebuah telepon genggam katakanlah seharga Rp 3.000.000,- (baca: tiga juta rupiah) dengan dominal 6 digit dibelakang angka tersebut secara psikologis masyarakat merasa bahwa harga telepon genggam tersebut terkesan merupakan harga yang sangat mewah. Uang pecahan Indonesia yang terbesar saat ini Rp 100.000. Uang rupiah tersebut mempunyai pecahan terbesar kedua di dunia, terbesar pertama adalah mata uang Vietnam yang mencetak 500.000 Dong. Namun hal itu tidak memperhitungkan negara Zimbabwe, dimana negara tersebut pernah mencetak 100 miliar dolar Zimbabwe dalam satu lembar mata uang.

RUU tentang perubahan harga rupiah (redenominasi rupiah) telah diusulkan oleh pemerintah kepada DPR sebagai prioritas Prolegnas 2013 pada tanggal 3 Agustus 2010, Gubernur BI mengumumkan rencana redenominasi (Siaran Pers BI No. 12/ 38/PSHM/Humas). Redenominasi rupiah adalah penyederhanaan mata uang rupiah dengan penghilangan tiga angka nol, tetapi nilainya tetap. Terjadi pro dan kontra. Yang pro menyatakan, redenominasi membuktikan Indonesia dalam kondisi lebih baik sehingga lebih siap untuk menerima tantangan baru, membuat operasi informasi teknologi (IT) dan penyimpanan data perdagangan saham lebih sederhana dan dapat mempercepat proses penyelesaian transaksi (*settlement*) perdagangan saham sehingga meningkatkan transaksi. Sedang yang kontra menyatakan, redenominasi dapat menimbulkan lonjakan inflasi sehingga dapat membebani masyarakat. Oleh karena itu, sebelum penerapan redenominasi rupiah pemerintah perlu melakukan kajian yang matang dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar kebijakan ini dapat dipahami secara utuh. Selain itu, persiapan infrastruktur juga sangat penting untuk menghindari terjadinya inflasi.

Negara Indonesia termasuk salah satu anggota ASEAN yang merupakan suatu organisasi perkumpulan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Pada tahun 2015, ASEAN telah menerapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia serta mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan standar hidup masyarakat.

Dengan pemberlakuan MEA tersebut, maka akan tercipta suatu pasar besar kawasan ASEAN yang akan berdampak besar terhadap perekonomian negara anggotanya sehingga diperlukan adanya penyetaraan ekonomi seluruh anggota ASEAN agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi. Untuk mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan kawasan ASEAN terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN tentu redenominasi dianggap penting.

Dengan MEA, redenominasi merupakan sarana yang akan diterapkan pemerintah untuk menyetarakan perekonomian tersebut. Redenominasi juga akan membantu perekonomian Indonesia terutama dalam bidang perdagangan. Pecahan uang Indonesia yang besar akan menimbulkan ketidakefisienan dan ketidaknyamanan dalam melakukan transaksi, karena diperlukan waktu yang banyak untuk mencatat, menghitung dan membawa uang untuk melakukan transaksi sehingga terjadi ketimpangan dalam transaksi ekonomi. Redenominasi pada akhirnya juga akan meningkatkan martabat dan kedaulatan bangsa yang akan dibahas dalam tulisan ini.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengertian Redenominasi**

Redominasi (*redenomination*) merupakan penyederhanaan dari nilai atau nominal yang tertera pada mata uang tertentu tanpa memotong nilai tukar uang itu sendiri, disertai dengan penyesuaian harga komoditas di pasaran dan nilai tukar dengan valuta asing (Ioana, 2005). Secara etimologi, redenominasi berasal dari kata latin “re” yang berarti kembali dan “denominare” yang berarti memberi nama khusus atau memecah. Sementara pengertian redenominasi mata uang menurut kata bahasa inggrisnya adalah “redenomination currency” yang berarti pertama, pecahan mata uang atau penyederhanaan mata uang sebagai dampak inflasi tertinggi (*the process whereby a country’s currency is recalibrated due to significant security*). Kedua, proses mengubah nilai mata uang demi keamanan sektor keuangan (*the process of changing the currency value on a financial security*).

Pengertian redenominasi menurut Bank Indonesia (BI), adalah penyederhanaan dari nilai atau nominal yang tertera pada mata uang tertentu tanpa memotong nilai tukar dari uang itu sendiri, disertai dengan penyesuaian harga komoditas di pasaran dan nilai tukar dengan valuta asing (valas). Misalnya satuan Rp.1.000,- disederhanakan menjadi Rp.1,-. Hal ini berlaku menyeluruh ke semua harga-harga barang dan jasa di negara tersebut. Dalam hal ini tidak ada yang dirugikan dari sistem redenominasi. Dalam redenominasi, akan ada pemotongan angka nol

pada nilai mata uang. Pemotongan nol biasanya tiga buah di belakang. Misalnya pecahan Rp 100.000 dipangkas 3 angka nolnya akan menjadi Rp 100.

Redenominasi, bisa disebut sebagai reformasi mata uang dan memiliki fungsi sebagai jalan pintas terakhir (*last of resort*) bagi otoritas moneter ketika terjadi inflasi ekonomi yang berlebihan, di mana mata uang domestik telah kehilangan nilai yang signifikan secara lokal dan internasional sebagai upaya untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik dalam ekonomi dalam negeri dan kebijakan ekonomi yang diterapkan di dalamnya (Mosley, 2005). Redenominasi telah diaplikasikan kira-kira di 50 negara (Ioana, 2005). Sebagai contoh, Bulgaria melakukan redenominasi dengan sukses terhadap mata uangnya pada tahun 1999 dan Angola dan Polandia tahun 1995. Sementara Brazil kembali berdenominasi mata uangnya pada tahun 1994 (Williams, 2008). Bank Sentral Nigeria (CBN) melalui gubernurnya membuat publik usulan untuk merestrukturisasi dan redenominasi naira dengan menjatuhkan dua nol atau bergerak dua titik desimal ke kiri dari mata uang dan mengeluarkan denominasi koin lebih banyak dengan maksud untuk menjamin stabilitas makroekonomi dan efisien sistem pembayaran. Pengumuman tersebut menimbulkan reaksi di dalam masyarakat, banyak perdebatan di kalangan Nigeria dan non-Nigeria dalam dan luar negeri. Sementara beberapa dari pandangan bahwa CBN layak pujian untuk langkah berani, yang lain mengutuk usulan tersebut, namun kelompok lain mencoba untuk mensintesis berbagai pandangan dari perspektif ekonomi politik. Meskipun, skema sejak saat itu telah ditangguhkan, *stakeholder* dan pengamat terus mengekspresikan pandangan mereka dan pendapat mengenai keinginan dan ketepatan waktu kebijakan (Bello, 2007).

Zimbabwe adalah salah satu negara yang cukup agresif melakukan redenominasi mata uangnya. Tercatat dalam 4 tahun terakhir, akibat hiper inflasi, Zimbabwe telah 3 kali melakukan redenominasi mata uangnya. Kesalahan utama Zimbabwe adalah melakukan redenominasi ketika inflasi sangat tinggi sehingga redenominasi semakin memperkuat efek inflasi tersebut.

Redenominasi tidak hanya dilakukan oleh negara yang nominal mata uangnya cukup besar. Salah satu contohnya adalah redenominasi mata uang anggota Uni Eropa ketika meredenominasi mata uangnya menjadi Euro (Crawley, 2002). Dalam hal ini, rasio konversinya bisa kurang dari satu. Satu Euro setara dengan 40,3 francs Belgia saat itu.

Secara teori, redenominasi tidak akan memberikan efek negatif terhadap perekonomian. Dalam tataran praktis, pelaku ekonomi adalah manusia yang tindakannya tidak sepenuhnya bersifat rasional karena adanya pengaruh emosi sehingga respon terhadap kebijakan redenominasi ini tidak bisa kita asumsikan 100% bersifat rasional. Ketakutan akan adanya kemungkinan inflasi akan menyebabkan orang akan cenderung memegang barang, terutama yang nilainya tahan terhadap inflasi. Sebagai contoh adalah emas. Tentu saja hal ini bisa berdampak buruk terhadap laju pertumbuhan ekonomi karena berpotensi mengurangi konsumsi. Apabila terjadi penukaran rupiah ke mata uang lain yang lebih kuat, maka akan terjadi penurunan nilai rupiah terhadap mata uang lain.

## **2.2 Redenominasi versus Sanering**

Hal yang penting adalah redenominasi tidak sama dengan sanering karena redenominasi tidak akan mengurangi daya beli. Sanering adalah pemotongan nilai uang sekaligus mengurangi daya beli terhadap barang dan jasa. Sanering terjadi pada saat kondisi perekonomian di suatu negara tidak sehat (BI, 2013).

Istilah Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan atau reorganisasi. Dalam ilmu ekonomi, sanering adalah pemotongan nilai uang tanpa mengurangi nilai harga sehingga daya beli masyarakat menurun. Sanering pernah dilakukan pada saat Orde Lama, yakni tahun 1950 untuk mengatasi situasi perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk antara lain hutang menumpuk, inflasi tinggi dan harga melambung. Kebijakan sanering pada waktu itu dikenal dengan sebutan “gunting Syarifuddin”, yang kemudian dilanjutkan Pemerintah pada tahun 1959 dan terakhir pada tahun 1965. Pemerintah memutuskan menurunkan jumlah uang beredar dengan cara memotong dua uang kertas yang memiliki nilai pecahan terbesar saat itu, yaitu Rp500 yang bergambar macan dan Rp1.000 bergambar gajah pada tanggal 24 Agustus 1959. Nilai masing-masing diturunkan hingga tinggal 10 persennya saja. Uang Macan yang semula mempunyai nilai Rp500 berubah menjadi Rp50 sedangkan uang gajah yang semula Rp1.000 berubah menjadi Rp100. Dan pemotongan nilai uang ini tidak terjadi dengan nominal-nominal yang lebih kecil.

Menurut buku sejarah Bank Indonesia (BI), keputusan pemerintah tersebut didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Prp. Tahun 1959 yang isinya menyebutkan pemerintah melakukan sanering uang pada 25 Agustus 1959 dengan menurunkan nilai uang pecahan Rp500 dan Rp1.000 menjadi Rp50 dan Rp100. Langkah ini dilakukan untuk menangani laju inflasi yang terus berlangsung hingga awal 1960-an. Dampak dari kebijakan yang segera efektif keesokan harinya, 25 Agustus 1959, pukul 6 pagi waktu Jawa dikarenakan informasi ini belum tersebar merata ke seluruh lapisan masyarakat, menyebabkan terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Peraturan ini menjadikan masyarakat menyerbu toko-toko untuk berlomba-lomba membelanjakan uang-uang macan dan gajahnya. Bank-bank juga diserbu masyarakat untuk menukarkan uang macan dan gajah

dengan pecahan yang lebih kecil. Kepanikan masyarakat ini terus terjadi sampai saat mulai diberlakukannya peraturan pemerintah tersebut tepat pukul 06.00. Masyarakat tidak mau memegang uang macan dan gajah. Mereka berlomba-lomba membelanjakan atau menukarkan ke bank. Akibat kebijakan itu, kekayaan rakyat yang dikumpulkan bertahun-tahun ludes dalam sekejap. Sementara masalah ekonomi tak juga membaik. Demikian pula posisi rupiah terhadap mata uang asing semakin terpuruk.

Sejarah diatas merupakan kebijakan sanering jilid ke 2 yang dilakukan pada pemerintahan orde lama. Pada 13 Desember 1965, juga melakukan kebijakan yang sama, yaitu menyunat tiga nol di belakang angka rupiah. Kebijakan itu membuat perekonomian Indonesia semakin kacau. Harga barang-barang terus meroket, bahkan inflasi sempat menyentuh 594%. Puncaknya terjadi pada 1966, ketika inflasi mencapai 635,5%. Rakyat pun kian menderita karena pendapatan mereka yang hanya US\$ 80 per tahun habis dimakan inflasi.

Sejarah pahit Indonesia di masa lalu tersebut mencatat bahwa Indonesia pernah mengalami masa-masa dimana perekonomian sangat meresahkan dan menyebabkan hiper inflasi yang berujung dilakukannya pemotongan nilai mata uang sekaligus nilai tukarnya oleh otoritas keuangan pada masa itu. Kebijakan memotong nilai mata uang sekaligus nilai tukarnya ini yang disebut dengan sanering.

Sebagaimana dijelaskan di atas, sanering adalah pemotongan nilai mata uang sekaligus nilai tukarnya. Artinya, pemotongan nilai mata uang yang dilakukan akan mempengaruhi daya beli penggunanya. Sanering menjadi pilihan pahit yang harus dilakukan pemerintahan suatu negara bilamana perekonomian negaranya mengalami kenaikan harga-harga secara eksesif (hiper inflasi) dan memiliki uang beredar yang berlebih. Oleh karena situasi yang dapat dikatakan genting ini, sanering biasanya dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya masa transisi terlebih dahulu. Hal inilah yang sekiranya pernah terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan Bung Karno. Negara Indonesia tercatat tiga kali melakukan sanering yakni pada tahun 1950, 1959, dan 1965. Kondisi perekonomian nasional saat itu dinilai sangat meresahkan. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang sangat rendah, nilai investasi yang merosot, dan inflasi yang sangat tinggi telah menjadikan nilai rupiah anjlok. Pemerintah pada saat itu pun menilai rupiah sudah tidak lagi mencerminkan nilai riilnya sehingga sanering menjadi diberlakukan. Keadaan seperti ini yang pada akhirnya menyisakan suatu trauma pada masyarakat terutama yang menimpa Kakek atau Ayah kita pada saat itu.

**Tabel 1. Ilustrasi Perbedaan Redenominasi dan Sanering**

No	Uraian	Perbedaan	
		Redenominasi	Sanering
1.	Dampak bagi Masyarakat	Tidak ada kerugian karena daya beli tetap sama.	Menimbulkan banyak kerugian karena daya beli turun drastis.
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam transaksi.</li> <li>Mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan negara regional.</li> </ul>	Mengurangi jumlah uang beredar akibat lonjakan harga-harga.
3.	Nilai uang terhadap barang	Tidak berubah, karena hanya cara penyebutan dan penulisan pecahan uang saja yang disesuaikan.	Nilai uang terhadap barang berubah menjadi lebih kecil, karena yang dipotong adalah nilainya.
4.	Kondisi saat dilakukan	Dilakukan saat kondisi makro ekonomi stabil. Ekonomi tumbuh dan inflasi terkendali.	Dilakukan dalam kondisi makro ekonomi tidak sehat, inflasi sangat tinggi (hiperinflasi).
5.	Masa transisi	Dipersiapkan secara matang dan terukur sampai masyarakat siap, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.	Tidak ada masa transisi dan dilakukan secara tiba-tiba.
6.	Contoh/Illustrasi	Bila terjadi redenominasi 3 digit (tiga angka nol), maka uang Rp 6,5 tetap dapat membeli 1 liter bensin.	Bila terjadi sanering per seribu rupiah, maka uang Rp 6,5 hanya dapat membeli 1/1000 atau 0,001 liter bensin.

Sumber: Dari berbagai sumber, diolah

### 2.3 Mengapa Harus Redenominasi?

Tujuannya redenominasi adalah sebagai efisiensi penghitungan dalam sistem pembayaran. Sukses redenominasi hanya bisa dilakukan pada saat inflasi dan ekspektasi inflasi stabil dan rendah. Intinya adalah penyederhanaan akunting dan sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak bagi ekonomi. Syarat keberhasilan redenominasi lainnya adalah persepsi dan pemahaman masyarakat yang mendukung yang didasarkan akan kebutuhan riil masyarakat. Penerapan redenominasi itu butuh waktu transisi sedikitnya lima tahun dan selama itu pedagang wajib mencantumkan label dalam dua jenis mata uang yakni uang lama yang belum dipotong dan uang baru sehingga tercipta kontrol publik. Selain itu, untuk melakukan redenominasi nilai tukar juga dibutuhkan penarikan uang yang beredar di masyarakat secara bertahap. Hal yang paling sulit dilakukan dengan cepat dan mudah adalah sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa.

Ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin melakukan penyederhanaan satuan nilai tukar. Tiga persyaratan itu adalah (Hardiyanto & Daulay, 2013):

- Kondisi ekonomi yang stabil
- Inflasi yang terjaga rendah dan
- Adanya jaminan stabilitas harga

Kebijakan redenominasi tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) yang memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal sehingga memerlukan sistem perbankan yang sehat. Redenominasi mata uang rupiah merupakan salah satu kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia.

**Tabel 2. Denominasi Terbesar Mata Uang di Negara ASEAN**

	<b>Mata Uang Negara ASEAN</b>	<b>1 USD</b>	<b>Denominasi Terbesar</b>
1	Vietnam Dong	20.843	500.000
2	Indonesia Rupiah	9.788	100.000
3	Laos Kip	8.030,65	50.000
4	Cambodia Riel	3.995	100.000
5	Myanmar Kyat	861,68	5.000
6	Philippines Peso	41,92	1.000
7	Thailand Baht	30,52	1.000
8	Malaysia Ringgit	3,05	100
9	Brunei Dollar	1,23	10.000
10	Singapore Dollar	1,23	10.000

Sumber: Materi Konsultasi Publik, 2013.

Latar belakang Bank Indonesia (BI) melakukan redenominasi adalah :

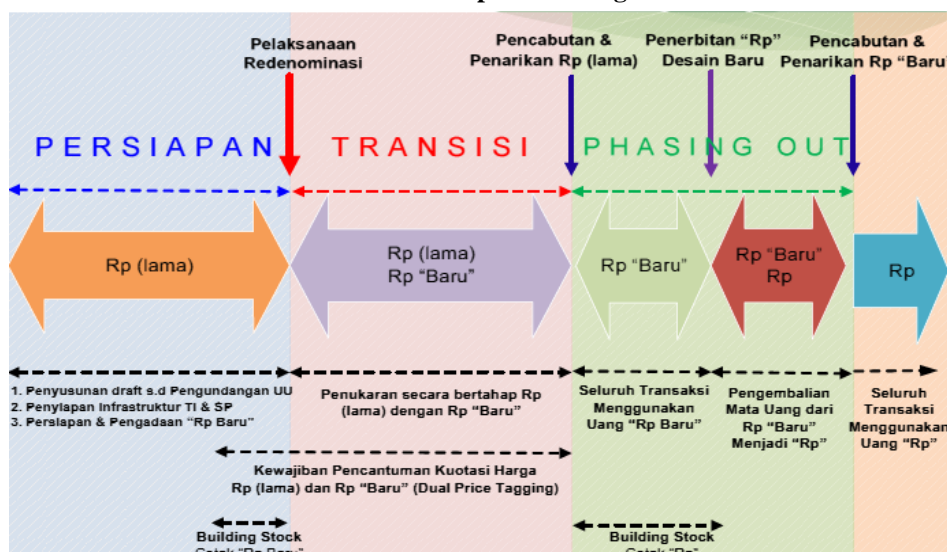
- 1) Uang pecahan Indonesia yang terbesar saat ini adalah Rp. 100.000,- yang merupakan pecahan terbesar kedua di dunia setelah mata uang Vietnam yang pernah mencetak 500.000 Dong.
- 2) Munculnya keresahan atas status rupiah yang terlalu rendah dari pada mata uang negara lain, seperti terhadap dolar, euro, dan uang global lainnya. Bukan soal substansi tetapi soal identitas karena kekuatan mata uang rupiah relatif stabil, cadangan devisa yang aman, inflasi terjaga, dan kinerja ekonomi yang baik.
- 3) Pecahan uang Indonesia yang terlalu besar akan menimbulkan ketidakefisienan dan ketidaknyamanan dalam melakukan transaksi, karena diperlukan waktu yang banyak untuk mencatat, menghitung dan membawa uang untuk melakukan transaksi sehingga terjadi ketidakefisienan dalam transaksi ekonomi.
- 4) Untuk mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan kawasan ASEAN dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015;
- 5) Untuk menghilangkan kesan bahwa nilai nominal uang yang terlalu besar seolah-olah mencerminkan bahwa dimasa lalu, suatu negara pernah mengalami inflasi yang tinggi atau pernah mengalami kondisi fundamental ekonomi yang kurang baik.

Dalam melaksanakan redenominasi, maka diperlukan beberapa tahapan. Bank Indonesia (BI) mengakui jika penerapan redenominasi tidaklah mudah sehingga harus melalui proses. BI telah menyiapkan tahapan-tahapan penyederhanaan nilai mata uang rupiah atau redenominasi ini mulai 2011-2020.

1. Tahun 2010  
Pada tahun ini pertama kali wacana redenominasi muncul. Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution menyatakan akan menghilangkan tiga angka nol di belakang rupiah. Langkah ini untuk menyederhanakan penyebutan satuan harga atau nilai rupiah.
2. Tahun 2011-2012.  
Bank Indonesia mulai melakukan pembahasan dengan pemerintah perihal rencana redenominasi. Periode ini juga sebagai masa sosialisasi. BI juga menyiapkan berbagai macam hal seperti menyangkut akuntansi, pencatatan, sistem informasi. Tahapan penyusunan rancangan undang-undang (RUU), rencana percetakan uang dan distribusinya juga sudah mulai berlangsung.
3. Tahun 2013-2015  
Periode ini merupakan masa transisi. Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia pada 23 Januari 2013, resmi menggelar serangkaian sosialisasi rencana redenominasi. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa redenominasi bukanlah pemangkasan nilai mata uang (sanering) tetapi penyederhanaan dengan menghilangkan beberapa nol. Pada masa ini akan ada dua jenis mata uang, yakni pecahan lama dan pecahan baru pascarendenominasi. Hal ini bertujuan membiasakan masyarakat dalam penggunaan mata uang baru nantinya baik dalam pembayaran maupun pengembalian transaksi. Sebagai contoh, harga produk senilai Rp 10.000 akan ditulis dalam dua harga yaitu Rp 10.000 (rupiah lama) dan Rp 10 (rupiah baru). BI juga akan perlahan-lahan mengganti uang rusak rupiah lama dengan uang rupiah baru.
4. Tahun 2016-2018  
Pada periode ini, pemerintah menargetkan uang saat ini (rupiah lama) akan benar-benar tak beredar lagi. BI akan melakukan penarikan uang lama secara perlahan pada masa transisi.
5. Tahun 2019-2020  
Pelaksanaan redenominasi mulai terjadi. Tahapan ini disebut phasing out, yakni saat dilakukan pengembalian mata uang rupiah dengan kata 'baru' menjadi rupiah. BI akan menyebarkan penggunaan mata uang baru sebagai pengganti uang lama.

Secara lebih jelas, untuk tahapan pelaksanaan redenominasi nilai rupiah di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Ilustrasi Tahapan Dan Kegiatan Redenominasi



Sumber: Bank Indonesia dan Materi Konsultasi Publik, 2013.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan dengan melakukan studi pustaka. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan pertimbangan (*judgement*) dan perspektif mengenai kebijakan redenominasi yang akan dijalankan pemerintah.

Data sekunder yang digunakan untuk memperkuat kebijakan redenominasi adalah tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita dan nilai tukar mata uang terhadap USD. Studi pustaka dilakukan dengan melihat pengalaman redenominasi di negara lain dan beberapa aspek yang terkait dengan kesuksesan dan kegagalan redenominasi di beberapa negara.

### Model Matrik IFE Dan EFE

Dalam melakukan kajian terhadap rencana pemerintah melakukan redenominasi dilakukan dengan menggunakan Matriks *Internal Factors Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE).

Menurut David (2015) dalam bukunya "*Strategic Management: Concept and Cases*", maka dalam IFE matriks akan menganalisa dua variable dari SWOT yaitu, *Strength* (kekuatan) apa saja yang dimiliki oleh sebuah organisasi (atau institusi) dan *Weakness* (kelemahan) yang ada dalam internal organisasi (atau institusi) itu sendiri. Sedangkan matriks *External Factor Evaluation* (EFE) memungkinkan para penyusun strategi untuk merangkum dan mengevaluasi *informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan*.

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam penyusunan Matriks IFE dan EFE dan Matriks Internal – Eksternal yaitu untuk melihat keterkaitan (*correlation*) antara Matriks IFE dan EFE (posisi *score* keduanya dalam satu grafik/gambar) agar dapat mudah dalam mengambil keputusan akhir (*final decision*).

### Langkah - langkah penyusunan IFE Matrix :

Dalam menyusun IFE matriks langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Membuat daftar faktor-faktor penting dari lingkungan internal kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).

- b) Menentukan bobot dimulai dari 0,0“Sangat Tidak Penting” sampai 1,0 “Sangat Penting” (Total bobot = 1,0). Yang berpengaruh terhadap posisi pemerintah.
- c) Memberikan rating 1 – 4 yang menggambarkan besarnya pengaruh faktor tersebut terhadap posisi pemerintah. Rating untuk kekuatan (1= “Tidak Penting”, 2= “Kurang”, 3= “Penting”, 4= “Sangat Penting”). Rating untuk faktor kelemahan kebalikan dari faktor kekuatan.
- d) Mementukan nilai score (Perkalian antara bobot dengan rating).
- e) Menentukan total nilai score untuk parameter tersebut.

**Langkah-langkah penyusunan EFE Matrix :**

Dalam menyusun EFE matriks langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Membuat daftar faktor-faktor kunci dari lingkungan eksternal: Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*).
- b) Menentukan bobot dimulai dari 0,0“Sangat Tidak Penting” sampai 1,0 “Sangat Penting” (Total bobot = 1,0). Yang merupakan dampaknya terhadap faktor strategis.
- c) Memberikan rating 1 – 4 yang menggambarkan besarnya pengaruh faktor tersebut terhadap posisi pemerintah. Rating untuk peluang (1= “Tidak Penting”, 2= “Kurang”, 3= “Penting”, 4= Sangat Penting).
- d) Rating untuk faktor ancaman (*Threats*) kebalikan dari faktor peluang (*Opportunities*).
- e) Mementukan nilai score (Perkalian antara bobot dengan rating).
- f) Menentukan total nilai score untuk parameter tersebut

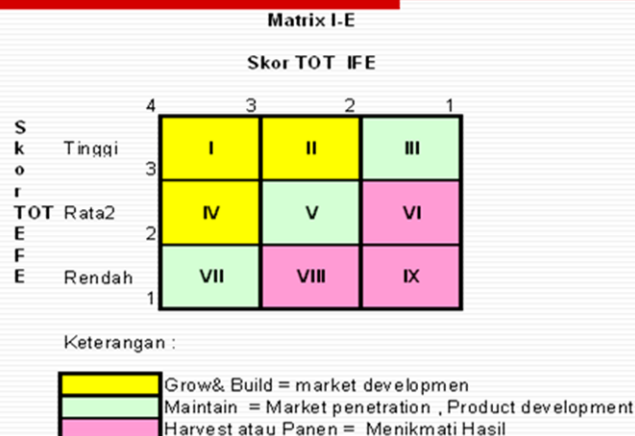
**Matriks Internal – Eksternal**

Setelah mendapatkan score matriks IFE dan EFE, kemudian dilakukan pencocokan posisi score tersebut dalam satu gambar dengan menggunakan “Matriks Internal dan Eksternal” dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika nilai score IFE dan EFE berada dalam kwadran I, II dan III (kotak “warna Kuning”), maka keputusannya adalah “*Grow and Build*”. Artinya rencana kebijakan redenominasi bisa dijalankan penuh karena banyak faktor-faktor pendukungnya.
- b) Jika nilai score IFE dan EFE berada dalam kwadran III, V dan VII (kotak “warna hijau”), maka keputusannya adalah “*Maintain*”. Artinya rencana kebijakan redenominasi masih dalam tahap menunggu sampai ada faktor-faktor lain yang bisa mendukung kebijakan tersebut.
- c) Jika nilai score IFE dan EFE berada dalam kwadran VI, VIII dan IX, maka keputusannya adalah “*Harvest*”. Artinya rencana kebijakan redenominasi sebaiknya tidak dijalankan karena kebijakan yang lama masih dapat digunakan atau mendukung.

**Tabel 3. Matriks Internal – Eksternal**

**Matrix Internal-External Bisnis**





### Parameter Matrik IFE Dan EFE

Dari hal-hal yang telah disampaikan diatas maka dalam penerapan redenominasi perlu dilakukan analisis *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE) dengan paramater-parameter sebagai berikut:

#### Analisis Internal Factor Evaluation (IFE)

Dalam IFE matriks akan menganalisis dua variable dari SWOT yaitu, *Strength* (kekuatan) apa saja yang dimiliki oleh pemerintah dan *Weakness* (kelemahan) yang ada dalam internal pemerintah itu sendiri. Dalam analisa kedua variable tersebut kami telah memberikan bobot nilai yang relevan sesuai dengan data yang ada. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Analisis Internal Factors Evaluation (IFE)**

No	Key Internal Factor	Weight	Rating	Weighted Score
<b><i>Strength (Kekuatan)*</i></b>				
1	Stabilitas makro ekonomi	0,15	4	0,60
2	Inflasi terkendali	0,15	4	0,60
3	PDB per kapita	0,10	4	0,40
4	Landasan hukum kuat	0,05	3	0,15
5	Keberhasilan program reformasi & restrukturisasi ekonomi	0,15	3	0,45
<b><i>Weakness (Kelemahan)**</i></b>				
1	Kondisi APBN buruk	0,05	3	0,15
2	Kebijakan makro lemah	0,05	3	0,15
3	Tambahan biaya mencetak uang baru	0,15	3	0,45
4	Daya beli masyarakat rendah	0,10	3	0,30
5	Masyarakat belum siap secara psikologis	0,05	3	0,30
	<b>Total Strength &amp; Weakness</b>	<b>1,00</b>		<b>3,55</b>

Catatan: Parameter dari \* dan \*\* adalah studi literatur dari berbagai sumber.

#### Analisis External Factor Evaluation (EFE)

Matriks Evaluasi Faktor Eksternal atau EFE memungkinkan para penyusun strategi untuk merangkum dan mengevaluasi informasi *ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan*. Dalam analisa EFE tersebut kami telah memberikan bobot nilai yang relevan sesuai dengan data yang ada. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Analisis External Factors Evaluation (EFE)**

No	Key External Factor	Weight	Rating	Weighted Score
<b><i>Opportunities (Peluang)*</i></b>				
1	Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	0,20	4	0,80
2	Meningkatkan martabat bangsa	0,15	4	0,60
3	Meningkatkan kedaulatan bangsa	0,15	4	0,60
4	Input, database, laporan, penyimpanan data, pencatatan dalam akuntansi cenderung lebih efisien serta informasi teknologi (IT) yang kuat.	0,20	3	0,60
5	Landasan Hukum	0,10	3	0,30

<b>Threats (Ancaman)**</b>				
1	Kurangnya sosialisasi (salah persepsi dengan kebijakan sanering)	0,02	3	0,06
2	Inflasi tidak terkendali (biaya dan risiko tinggi)	0,05	3	0,15
3	Stock uang baru tidak tersedia pada saat dibutuhkan	0,05	3	0,15
4	Adanya <i>money illusion</i> (harga barang dianggap menjadi lebih murah)	0,05	2	0,10
5	Pemerintah tidak bisa mengatur stabilitas harga kebutuhan pokok	0,03	2	0,06
<b>Total Opportunities dan Threats</b>		<b>1,00</b>		<b>3,42</b>

Catatan: Parameter dari \* dan \*\* adalah studi literatur dari berbagai sumber.

### Pembahasan Model IFE dan EFE Serta Matriks Internal-Eksternal (I-E)

Pada bagian berikut akan dibahas masing-masing keterkaitan antara parameter dan *score* nilai yang telah ditentukan pada Tabel 5 dan Tabel 6 diatas sebagai berikut:

Berdasarkan Tabel matriks IFE di atas apabila kita bandingkan antara kedua variabel dari Internal Factor Evaluation (IFE) diatas yaitu, antara kekuatan (*strenght*) dengan kelemahan (*weakness*), maka akan diperoleh bobot nilai, dimana bobot nilai strength-nya yaitu sebesar **2,2**. Adapun elemen dari Kekuatan (*Strength*) yang kami ambil adalah:

- Stabilitas makro ekonomi dengan bobot sebesar 0,60
- Inflasi yang terkendali dengan bobot 0,60
- PDB per kapita dengan bobot 0,40
- Landasan Hukum yang baik dengan bobot 0,15
- Keberhasilan program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dengan bobot 0,45

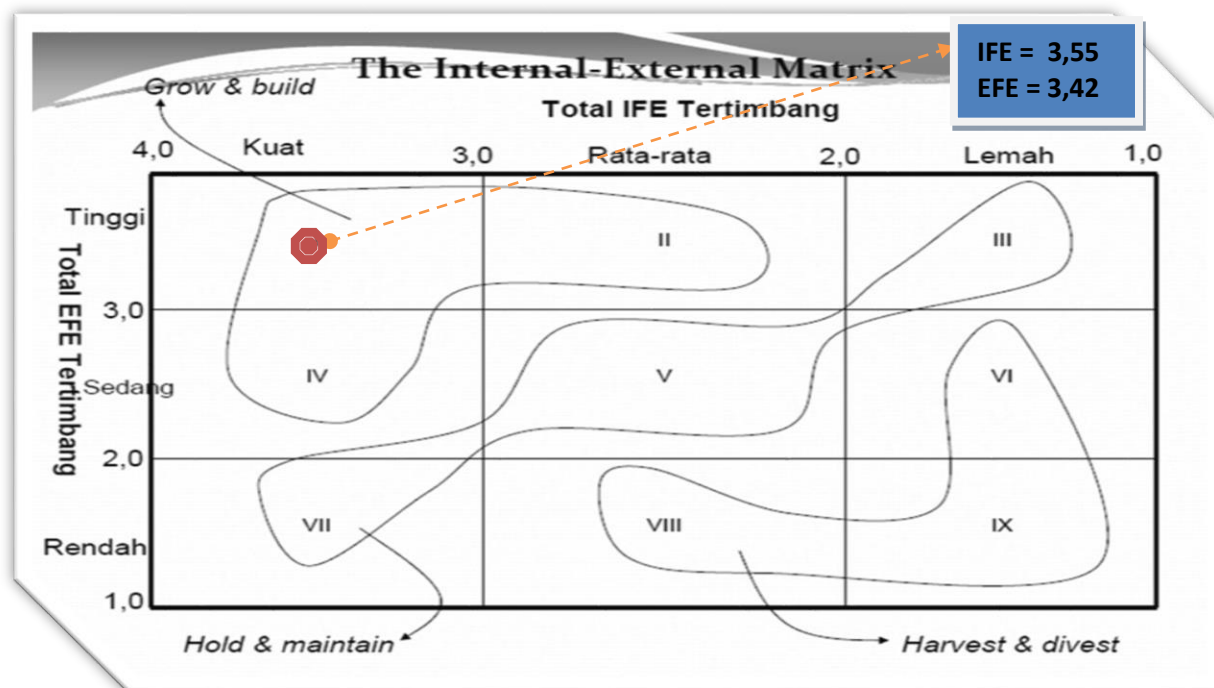
Sedangkan bobot Kelemahan (*Weakness*) yaitu sebesar **1,35**, yang terdiri dari 5 (lima) elemen yaitu:

- Kondisi APBN dengan bobot 0,15
- Kebijakan makro dengan bobot 0,15
- Tambahan biaya mencetak uang baru dengan bobot 0,45
- Daya beli (*purchasing power*) masyarakat dengan bobot 0,30
- Masyarakat belum siap secara psikologis dengan bobot 0,30.

Dengan melihat perbandingan antara Kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*), maka terdapat perbedaan nilai yang sangat signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan redenominasi yang akan diberlakukan didukung dengan memberdayakan kekuatannya dan berusaha menutupi berbagai kelemahan. Jadi nilai total Internal Factor Evaluation (IFE) adalah **3,55** yang menggambarkan bahwa kebijakan untuk redenominasi diharapkan dapat berhasil mengelola kekuatan internalnya dan mengatasi kelemahannya dengan baik. Dengan demikian kebijakan yang akan diambil pemerintah terkait dengan kebijakan redenominasi yang memiliki posisi internal yang kuat (*Strong Internal Position*).

Sedangkan Dari table EFE terkait informasi *ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan*. dapat kita analisa bahwa pemerintah juga memiliki penanganan terhadap peluang dan tantangan yang bagus. Ini terbukti dari hasil analisa bahwa total dari bobot peluangnya (*Opportunities*) adalah sebesar **2,90**, sedangkan bobot dari tantangannya (*Strength*) adalah sebesar **0,52**. Jadi bobot antara peluang dan tantangan memiliki "Gap" yang lumayan jauh sehingga peluang yang dimiliki bisa dimanfaatkan untuk menutup tantangan yang ada.

Selanjutnya dari hasil score IFE & EFE diatas dapat dicari posisiscore IFE dan EFE (bersama-sama) dengan menggunakan "**The Internal-External Matrix**" dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 2. Output Matriks Internal –External (I-E)

Dengan demikian posisi IFE dan EFE berada pada posisi “Grow & Build” dimana rencana kebijakan redenominasi “kuat dan tinggi” (*strong and high*). Artinya kebijakan redenominasi bisa dijalankan karena sangat penting agar bisa bersaing dengan negara lain yang telah terlebih dahulu menerapkannya. Dari Tabel IFE terkait dengan kekuatan (*Strength*), maka kondisi ekonomi yang stabil juga merupakan persyaratan dalam pelaksanaan redenominasi. Hal ini dapat dilihat pada Produk Domestik Bruto (PDB), Pertumbuhan Ekonomi serta inflasi dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 6. Pertumbuhan Ekonomi, PDB Per Kapita & Inflasi (2006 – 2015)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	PDB PER KAPITA (Dalam USD)	Inflasi (%)
	(%)		
2006	5,50	1,590	6,60
2007	6,30	1,861	6,59
2008	6,0	2,168	11,06
2009	4,60	2,263	2,78
2010	6,10	3,125	6,96
2011	6,50	3,648	3,79
2012	6,30	3,701	4,30
2013	5,80	3,624	8,38
2014	5,02	3,492	8,36
2015	4,79	3,377	3,35

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS), World Bank, Diolah.

Produk Domestik Bruto (PDB) sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Selain itu jika melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, khususnya tahun 2006–2015, maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi relatif stabil walaupun tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan namun masih dalam koridor normal dan tidak mengkhawatirkan karena memang kondisi global juga mengalami hal yang sama.

Begitupula tingkat inflasi yang terkendali menjadi harapan agar redenominasi dapat dijalankan. Jika diperhatikan perkembangan tingkat inflasi di Indonesia selama 10 tahun terakhir, maka dapat dikatakan stabil, dimana inflasi rata-rata berada pada tingkat yang rendah (< 10% per tahun) walaupun pada tahun 2005 dan tahun 2008 inflasi di Indonesia berada pada tingkat menengah. Hal ini dikarenakan pada tahun 2005 dan tahun 2008

terjadi kenaikan harga minyak dunia. Dengan demikian stabilitas ekonomi Indonesia yang stabil juga merupakan salah satu pertimbangan pemerintah untuk dapat melaksanakan redenominasi nilai rupiah.

**Tabel 7. Pelaksanaan Redenominasi Beberapa Negara Beserta Tingkat Inflasi (Y/N)**

Country	Years & Annual Inflation Rates	Redenomination?
Albania	1992 (226%)	No
Angola	1992 (299%), 1993 (1379%), 1994 (949%), 1995 (2672%), 1996 (4145%), 1997-2002 (average, 194%).	Yes, 1995.
Argentina	1975-1982; average annual rate 267%	Yes, 1983.
Argentina	1983 (344%), 1984 (627%), 1985 (672%)	Yes, 1985.
Argentina	1987, 1988, 1989 (3080%), 1990 (2314%), 1991 (172%)	Yes, 1992.
Armenia	1994 (4962%), 1995 (176%)	No.
Azerbaijan	1992 (912%), 1993 (1129%), 1994 (1665%), 1995 (412%)	Yes, 1992.
Belarus	1993 (1190%), 1994 (2221%), 1995 (709%)	Yes, 1992.
Belarus	1999 (294%), 2000 (169%)	Yes, 2000.
Bolivia	1981-1986; peaked at 11749% in 1985.	Yes, 1987.
Brazil	1981-1985, average annual rate 151%.	Yes, 1986.
Brazil	1986 (147%), 1987 (228%), 1988 (629%), 1989 (1431%)	Yes, 1989.
Brazil	1990 (2948%), 1991 (433%), 1992 (952%), 1993 (1928%), 1994 (2076%)	Yes, 1993 and 1994.
Bulgaria	1991 (338%), 1996 (122%), 1997 (1058%)	Yes, 1999.
Chile	1973 (362%), 1974 (505%), 1975 (375%), 1976 (212%)	Yes, 1975.
Congo, Dem. Rep.	1979 (101%), 1989 (104%), 1991 (2154%), 1992 (4129%), 1993 (1987%)	Yes, 1993.
Congo, Dem. Rep.	1994 (23773%), 1995 (542%), 1996 (542%), 1997 (176%)	Yes, 1998.
Congo, Dem. Rep.	1999 (285%), 2000 (514%), 2001 (360%)	No.
Croatia	1992 (625%), 1993 (1500%), 1994 (107%)	Yes, 1994.
Georgia	1995 (163%)	Yes, 1995.
Ghana	1977 (116%), 1981 (117%), 1983 (123%)	No.
Indonesia	1962 (131%), 1963 (146%), 1964 (109%), 1965 (307%), 1966	No.
Israel	1980 (131%), 1981 (117%), 1982 (120%), 1983 (146%), 1984 (374%), 1985 (305%)	Yes, 1980 and 1985.
Kazakhstan	1994 (1877%), 1995 (176%)	No.
Laos	1999 (128%)	No.
Latvia	1992 (243%), 1993 (109%)	Yes, 1993.
Lebanon	1987 (488%), 1988 (128%)	No.
Lithuania	1993 (410%)	Yes, 1993.
Macedonia	1994 (126%)	Yes, 1993.
Mexico	1983 (102%), 1987 (132%), 1988 (114%)	Yes, 1993.
Mongolia	1993 (268%)	No.
Nicaragua	1985-1991. Highest in 1989 (4770%), 1990 (7485%) and 1991 (2945%)	Yes, 1998.
Peru	1983 (112%), 1984 (110%), 1985 (163%)	Yes, 1985.
Peru	1988 (667%), 1989 (3399%), 1990 (409%)	Yes, 1991.
Poland	1982 (104%), 1989 (245%), 1990 (555%)	Yes, 1995.
Romania	1991 (231%), 1992 (211%), 1993 (255%), 1994 (137%), 1997 (155%)	Yes, 2005.
Russia	1993 (875%), 1994 (308%), 1995 (197%)	Yes, 1998.
Sierra Leone	1987 (179%), 1990 (111%), 1991 (103%)	No.
Sudan	1991 (124%), 1992 (118%), 1993 (101%), 1994 (115%), 1996 (134%)	Yes, 1992.
Suriname	1993 (144%), 1994 (368%), 1995 (236%)	No.

Country	Years & Annual Inflation Rates	Redenomination?
Turkey	1980 (110%), 1994 (106%)	Yes, 2005.
Uganda	1981 (109%), 1985 (9158%), 1986 (161%), 1987 (200%), 1988 (196%).	Yes, 1987.
Ukraine	1993 (4735%), 1994 (891%), 1995 (377%)	Yes, 1996.
Uruguay	1968 (125%)	Yes, 1975.
Uruguay	1990 (113%), 1991 (102%)	Yes, 1993.
Zambia	1989 (123%), 1990 (107%), 1992 (166%), 1993 (183%)	
Zimbabwe	2002 (140%), 2003 (estimated 1.000%)	No.

Sumber: Layna Mosley, Dept. of Political Science, University of North Carolina. 2005.

Note: a Inflation data from the World Bank, World Development Indicators, annual percent change in consumer prices; b There are additional redenominations, often in response to high levels of inflation; but comparable inflation data are not available. These include Brazil (redenominates 1967 and 1970), Estonia (1992), Kyrgyz Republic (1993), Moldova (1993), Uzbekistan (1993), and Vietnam (1975 and 1985).

Tingkat inflasi yang stabilinflasi yang rata-rata berada pada tingkat yang rendah (< 10% per tahun) bisa menjadi suatu catatan bahwa ekonomi Indonesia masih dapat dikatakan cukup baik. Bandingkan dengan tingkat inflasi dari beberapa negara, namun tetap menjalankan kebijakan redenominasi (Lihat **Tabel 7**). Sebagai contoh Turki yang sukses dalam penerapan kebijakan redenominasi yang dijalankan tahun 2005 walaupun memiliki tingkat inflasi yang sangat tinggi. Begitupula dengan negara lainnya seperti Romania yang menjalankan redenominasi ditahun yang sama. Redenominasi yang dilakukan Turki adalah mengubah 1.000.000 lira menjadi 1 lira pada tahun 2006.

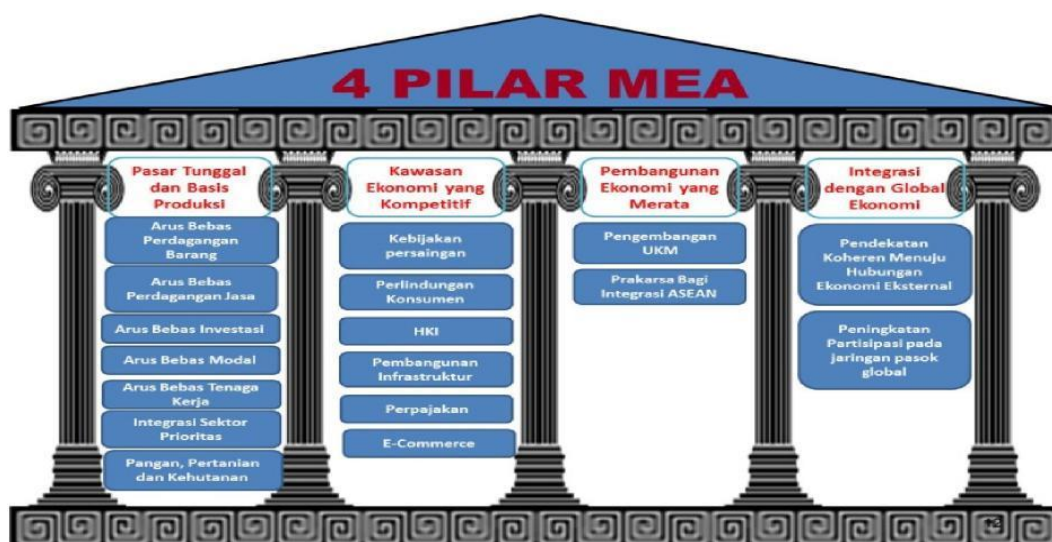
## SIMPULAN

Berdasarkan analisis matriks IFE dan EFE serta Matriks Internal-Eksternal. ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah sebelum menjalankan kebijakan redenominasi sebagai berikut:

1. Dalam matriks IFE dan EFE serta matriks Internal-Eksternal diatas dengan hasil “kuat dan tinggi” (*strong and high*) dan berada pada posisi “*Grow & Build*” memperkuat argumen pentingnya penerapan denominasi rupiah sesegera mungkin karena didukung oleh berbagai faktor pendukung. Pemerintah tidak perlu ragu-ragu lagi untuk melaksanakan kebijakan redenominasi tersebut. Jika tidak dilaksanakan maka akan munculnya keresahan atas status rupiah yang terlalu rendah dari pada mata uang negara lain, seperti terhadap Dollar, Euro, dan mata uang global lainnya.
2. Terkait dengan aspek sosial yang ada pada matriks EFE, pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur redenominasi rupiah atau redenominasi mata uang (*currency redenomination*) dan melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. DPR sebagai lembaga legislatif juga perlu mencermati dengan teliti apa yang telah dirumuskan dan diusulkan pemerintah dalam RUU Perubahan Harga Rupiah alias redenominasi ini. Sosialisasi kebijakan ini hendaknya tidak hanya dilakukan pemerintah saja, namun DPR ikut mendukung serta beberapa pelaku usaha seperti bank dan konsultan yang terkait dengan aktifitas keuangan untuk mengetahui secara pasti respon masyarakat akan kebijakan tersebut.
3. Secara demografi terkait dengan matriks EFE, pencantuman jumlah nol yang banyak dalam mata rupiah mengakibatkan ongkos bertransaksi terlalu mahal atau tidak efisien. Akibatnya pecahan mata uang yang terlalu besar menjadikurang efisien karena membuat proses pembayaran dan transaksi tunai menjadi lebih sulit. Dengan demikian pengurangan pecahan mata uang dapat menyederhanakan sistem akuntansi dan pembayaran terkait dengan transaksi keuangan.
4. Terkait dengan matriks IFE mengenai faktor “kelemahan” (*weakness*), mata uang rupiah saat ini menjadi bahan “*bullying*” negara lain terutama di negara Asia. Sebagai contoh dalam suatu film drama Asia yang pernah saya tonton di bioskop juga memperlihatkan bagaimana mata uang rupiah menjadi bahan komedi/guyonan pada saat dialog antar para pemain asing tersebut terkait dengan jumlah nol yang terlalu banyak namun nilai sebenarnya “tidak besar” karena harus dikonversi lagi dengan mata uang lainnya. Begitupula dalam terjemahan teks film Indonesia kedalam bahasa Inggris dalam bioskop yang diputar dimasyarakat ada beberapa hal yang *misleading* dalam penterjemahan konversi mata uang rupiah kedalam bahasa Inggris. Sebagai contoh: Harga tissue adalah Rp 8.000,- diterjemahkan menjadi USD 1,- (dibuat

- kesetaraan) padahal kurs yang berlaku pada saat itu adalah Rp 13.000,-Terjemahan ini mungkin agar orang asing tidak kaget dengan harga tissue di Indonesia yang sepiantas terdengar “sangat mahal”.
5. Jika dilihat dari matriks IFE terkait dengan “kekuatan” (*strength*), Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara Turki (*lesson learned*) yang merupakan contoh negara yang sukses melakukan redenominasi. Turki melakukan hal tersebut agar mata uangnya bisa bermartabat dan berdaulat. Sebelumnya 19 negara Uni Eropa telah menggunakan mata uang tunggal Euro yang dipakai sejak 1 Januari 1999 dan secara fisik baru dipakai pada tanggal 1 Januari 2002.
  6. Terkait dengan redenominasi yang dijalankan oleh negara Turki, maka Indonesia harustelah siap menerapkannya (*lesson learned*), apalagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah diberlakukan sejak tahun 2015. Dengan pemberlakuan MEA tersebut, maka akan tercipta suatu pasar besar kawasan ASEAN yang akan berdampak besar terhadap perekonomian negara anggotanya sehingga diperlukan adanya penyetaraan ekonomi seluruh anggota ASEAN agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi.
  7. Dalam cetak biru (*blueprint*) MEA tahun 2015 terdapat empat tujuan pilar utama MEA dimana dalam pilar ke-2 terkait dengan kawasan ekonomi yang kompetitif. Tujuan tersebut merupakan prakondisi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian pasar tunggal dan basis produksi internasional. Pencapaian tujuan kedua itu dilakukan melalui kerja sama di berbagai bidang yang meliputi (i) pengembangan infrastruktur, seperti transformasi, informasi, energi, pertambangan, dan keuangan; (ii) kebijakan persaingan; (iii) perlindungan konsumen; (iv) hak kekayaan intelektual; (v) perpajakan; dan (vi) *e-commerce*.

Dengan demikian diharapkan redenominasi mata uang (*currency redenomination*) terkait dengan keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dapat dianggap sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi mata uang dan daya saing (*competitive advantage*) bangsa Indonesia agar menjadi lebih setara dibandingkan negara lain terutama negara ASEAN.



Sumber: Working Paper BI. WP/3/2015

Gambar 3. Empat Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, *Kebijakan Redenominasi Bukan Sanering*, Siaran Pers Bersama Kementerian Keuangan Dan Bank Indonesia, No.11/KLI/2013, No.15/3/PSHM/Humas.
- Bank Indonesia, Working Paper, *Analisis Daya Saing Dan Strategi Industri Nasional Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Perdagangan Bebas*, September, 2015.
- Bank Indonesia, Kamus Bank Sentral Republik Indonesia, “*Pengertian Redenominasi*”, <http://www.bi.go.id/web/id/>
- Bello, Ahmad. 2007. *The Economics of Currency Redenomination: An Appraisal of CBN Redenomination Proposal*. Munich Personal RePEc Archive (MPRA). Zaria-Nigeria.
- Calomiris, Charles. 2006. *Devaluation With Contract Redenomination in Argentina*. National Bureau of Economic Research. Graduate School of Business. Columbia University
- David, Fred R, 2015. *Strategic Management: Concepts & Cases, A Competitive Advantage Approach*, 15th Edition, Pearson, Global Edition, USA, 2015
- De Santis, Roberto, 2015., A Measure of Redenomination Risk, Working Paper Series, European Central Bank (ECB).
- Hardiyanto, Arif, Daulay., Analisis Persepsi Pelaku Usaha Di Kota Medan Terhadap Rencana Redenominasi, Jurnal Ekonomi & Keuangan Vo. I No.4 Maret 2013.
- Iona, D. 2005. *The National Currency Re-denomination Experience in Several Countries: A Comparative Analysis*”, International Multidisciplinary Symposium Universitaria Simpro, 2005.
- Juanda, Bambang, “*Kebijakan Redenominasi Rupiah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia*”, Makalah yang disampaikan pada Kuliah Umum di Dept. Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor tanggal 17 April 2013.
- Kesumajaya, I.W.W. “*Redenominasi Mata Uang Rupiah Merupakan Bagian dari Tugas Bank Indonesia untuk Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran di Indonesia*”, GaneC Swara Vol. 5 No.1, Pebruari 2011.
- Kurnianingrum, Trias P, *Redenominasi Rupiah Dalam Perspektif Hukum*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, 2013.
- Lianto, J dan Ronald Suryaputra. “*The Impact of Redenomination in Indonesia from Indonesian Citizens’ Perspective*”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 40 (2012): 1 – 6.
- Moshley, Layna, 2005, *Dropping Zeros, Gaining Credibility? Currency Redenomination in Developing Nations*. Dept. of Political Science University of North Carolina Chapel Hill, NC

Nilasari, Erissa, 2014, *Urgensi Redenominasi Nilai Rupiah Dalam Perekonomian Indonesia*, Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Zidek, Libor et.al, 2015, *Impact of Currency Redenommination on Inflation Case Study Turkey*, Asian Economic & Financial Review.